

LAPORAN MAGANG MAHASISWA

**Analisis Sistem Informasi Akuntansi Berupa Penggunaan *Payment Online System*
Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Pemberian Keringanan Wajib Pajak Pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta**



Javier Erlandaffa Satria Dwikamba

Nomor Mahasiswa: 19312482

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN BEBAS PALGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Javier Erlandaffa Satria Dwikamba

NIM : 19312482

Jurusan : S1 Akuntansi

Fakultas : Bisnis dan Ekonomika

Judul : Analisis Sistem Informasi Akuntansi Berupa Penggunaan
Payment Online System Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap
Pemberian Keringanan Wajib Pajak Pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Agustus 2023



Javier Erlandaffa Satria Dwikamba

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG MAHASISWA

BPKAD KOTA YOGYAKARTA

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggunaan *Payment Online System* Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Pemberian Keringanan Wajib Pajak Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Dibuat oleh:

Javier Erlandaffa Satria Dwikamba

19312482

Disahkan oleh,

Yogyakarta, 6 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



(Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak., CA, ACPA)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR MAGANG

TUGAS AKHIR BERJUDUL

**Analisis Sistem Informasi Akuntansi Berupa Penggunaan Payment Online System Pajak Bumi
Dan Bangunan terhadap Pemberian Keringanan Wajib Pajak Pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta**

Disusun Oleh : JAVIER ERLANDAFFA SATRIA DWIKAMBA

Nomor Mahasiswa : 19312482

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: Selasa, 05 September 2023

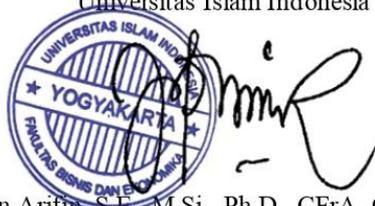
Penguji/ Pembimbing TA : Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak.



Penguji : Muamar Nur Kholid, S.E., M.Ak., Ak., CA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Javier Erlandaffa Satria Dwikamba

NIM : 19312482

Jurusan : S1 Akuntansi

Fakultas : Bisnis dan Ekonomika

Judul : Analisis Sistem Informasi Akuntansi Berupa Penggunaan Payment Online System Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Pemberian Keringanan Wajib Pajak Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan magang ini merupakan karya tulis saya pribadi tanpa campur tangan oleh pihak lain, selain pembimbing dan narasumber yang berkaitan.
2. Keseluruhan Laporan magang ini belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun baik di Universitas Islam Indonesia, maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Dalam Laporan magang ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah diakui hak milik oleh orang lain kecuali dituliskan sebagai rujukan dalam penulisan dan tercantum pada daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Agustus 2023



Javier Erlandaffa Satria Dwikamba

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat mampu menyelesaikan laporan magang yang berjudul “**Analisis Sistem Informasi Akuntansi Berupa Penggunaan Payment Online System Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Pemberian Keringanan Wajib Pajak Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta**” Laporan magang ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang bertujuan memperkaya wawasan dan mempertajam ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi.

Penulis menyadari sulit untuk menyelesaikan laporan magang ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:.

- 1) Puji dan syukur tak henti-hentinya kepada Allah SWT atas semua nikmat yang diberikan serta kemudahan hingga saya dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir magang sebagai upaya memenuhi syarat kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika;
- 2) Sholawat serta salam tak henti-hentinya kepada junjungan nabi besar dan suri tauladan nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya;
- 3) Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak., CA, ACPA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan laporan magang ini;
- 4) BPKAD kota Yogyakarta yang telah banyak membantu memberikan ilmu dan wawasan serta membantu untuk memperoleh data yang diperlukan untuk tujuan penulisan laporan ini;
- 5) Kedua orang tua saya tercinta, Jon Nafri dan Susanti serta kakak dan adik saya yang saya sayangi, Muhammad Jihad Satria, dan Javier Erlandhika Satria Dwikamba yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan mendoakan tiada henti;

- 6) Saleh, Acha dan lainnya. Teman kuliah yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses mengerjakan laporan magang.
- 7) Humam, Saphi, Bayu, dan Dyah . Teman kuliah sekaligus teman lomba yang telah mensupport dan memberikan masukan.
- 8) Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu atas bantuannya secara langsung maupun tidak langsung sehingga laporan magang ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan laporan ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan segala pihak yang telah membantu selama proses pembuatan laporan magang. Semoga laporan magang ini membawa manfaat untuk perkembangan ilmu.

Yogyakarta, 8 Agustus 2023



Javier Erlandaffa Satria Dwikamba

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	5
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	10
DAFTAR GAMBAR.....	11
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 Latar belakang.....	12
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Magang	14
1.4 Manfaat Magang	15
1.4.1 Bagi Penulis.....	15
1.4.2 Bagi Instansi	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi (SIA)	17
2.1.2 Siklus Pendapatan.....	18
2.1.3 Pajak	20
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	21

2.1.5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	22
2.2	Kajian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN		29
3.1	Jenis Penelitian	29
3.2	Sumber dan Data Penelitian.....	29
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4	Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		32
4.1	Profil Instansi	32
4.2	Pelaksanaan Program Magang.....	36
4.3	Hasil Analisis	40
4.3.1	Penggunaan POS (Payment Online System).....	40
4.3.2	Efisiensi penggunaan POS PBB.....	47
4.3.3	Hambatan.....	49
4.3.4	Upaya.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		54
DAFTAR PUSTAKA.....		56
LAMPIRAN		58

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kajian Terdahulu	26
Tabel 4. 1 Pelaksanaan Magang	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta..	32
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.....	34
Gambar 4. 3 Flowchart alur Pemberian keringanan kepada wajib pajak	46
Lampiran 1 CV peserta Magang.....	59
Lampiran 2 Halaman Depan POS PBB	59
Lampiran 3 Bagian Pencarian Permohonan	59
Lampiran 4 Bagian Form Proses Pengurangan	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penggunaan sistem yang tidak terotomatisasi berpengaruh pada penggunaan sumber daya yang tidak optimal sehingga memberikan dampak negatif dari sebuah entitas. Kinerja karyawan yang lambat hingga kurangnya penerimaan dari pendapatan entitas dapat menjadi dampak dari kurang optimalnya penggunaan sumber daya baik secara tenaga, waktu dan biaya yang tersedia. Oleh karena itu, mengevaluasi kinerja entitas mengenai penggunaan sumber daya yang tersedia akan memberikan dampak positif pada entitas tersebut.

Untuk mengatasi penggunaan sumber daya secara berlebih, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dapat menjadi salah satu opsi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut. Saat ini, penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) mengalami peningkatan peminat di berbagai sektor. Salah satu manfaat dari penggunaan sistem informasi diantaranya adalah dapat mempermudah sebuah entitas untuk mengevaluasi bagaimana jalannya entitas mereka, mengurangi kesalahan karena kesalahan manusia dan banyak lainnya. Tidak hanya itu, penggunaan sistem informasi akuntansi juga dapat memengaruhi biaya yang seharusnya digunakan oleh sebuah entitas menjadi lebih efisien (Romney & Steinbart, 2018). Penggunaan sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang ada dalam perusahaan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai salah satu instansi pemerintah yang melakukan kegiatan penerimaan dari masyarakat berupa penerimaan pajak baik itu pajak daerah maupun Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah seharusnya memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak (WP). dengan baiknya pelayanan yang ada, tentu akan memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka kepada negara. Pelayanan yang baik kepada wajib pajak dapat diberikan dengan memberikan pelayanan yang cepat kepada wajib pajak.

Munculnya perubahan sistem pada proses keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang semula tidak menggunakan aplikasi kemudian berpindah ke penggunaan aplikasi *Payment Online System* (POS) PBB pada tahun 2020 memberikan dampak terhadap penggunaan sumber daya yang ada. Selain mengurangi kesalahan manusia yang terjadi, kinerja karyawan menjadi lebih cepat daripada sebelum menggunakan aplikasi. Wajib pajak yang seharusnya menunggu lebih lama saat tidak menggunakan aplikasi, kini dapat menunggu lebih cepat saat adanya penerapan POS PBB. Didukung dengan adanya penelitian mengenai penggunaan aplikasi POS PBB dapat mempersingkat waktu yang ada dan menghemat tenaga yang tersedia (Anggraini, 2020).

Oleh karena penggunaan POS PBB yang baru digunakan oleh BPKAD kota Yogyakarta pada tahun 2020 sebagai bentuk dari efisiensi BPKAD dalam pengoptimalan pencatatan merupakan hal yang menarik bagi penulis untuk meneliti efisiensi dalam penerapan POS PBB tersebut. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggunaan *Payment Online System* Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Pemberian Keringanan Wajib Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan sistem informasi akuntansi berupa penggunaan POS PBB terhadap pemberian keringan wajib pajak pada BPKAD kota Yogyakarta?
2. Apakah penggunaan POS PBB terhadap pemberian keringanan pada BPKAD kota Yogyakarta sudah efisien?
3. Apa saja hambatan dalam penggunaan sistem informasi akuntansi berupa penggunaan POS PBB terhadap pemberian keringanan terhadap wajib pajak pada BPKAD kota Yogyakarta?
4. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan penggunaan POS PBB terhadap pemberian keringanan pada BPKAD kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan Magang

1. Menganalisis prosedur pemberian keringan wajib pajak pada sub.bidang penagihan BPKAD kota Yogyakarta.
2. Menganalisis efisiensi dari penggunaan POS PBB dalam memberikan keringan kepada Wajib Pajak pada sub.bidang BPKAD kota Yogyakarta.
3. Mengetahui hambatan dalam penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Berupa Penggunaan POS PBB terhadap Pemberian Keringanan Wajib Pajak pada sub.bidang BPKAD kota Yogyakarta.

4. Memberikan solusi dalam mengatasi hambatan penggunaan POS PBB dalam pemberian keringanan pada sub.bidang BPKAD kota Yogyakarta.

1.4 Manfaat Magang

1.4.1 Bagi Penulis

- a. Mendapat pengalaman dan pengetahuan selama kegiatan magang.
- b. Mengetahui relevansi antara studi yang dipelajari oleh mahasiswa selama perkuliahan dengan penerapannya dalam dunia kerja.
- c. Memahami penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang terjadi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta selama kegiatan magang.
- d. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menganalisis dan mengkaji mengenai efisiensi dari penggunaan sistem informasi akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

1.4.2 Bagi Instansi

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mendapat relasi yang baik dengan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII terkhusus program studi akuntansi dalam meningkatkan kualitas pendidikan agar mahasiswa siap menghadapi dunia kerja.

- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mendapat informasi mengenai efisiensi dari penerapan sistem informasi akuntansi terhadap prosedur pemberian keringanan.
- c. Membantu dalam meningkatkan kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Menurut ahli, sistem informasi akuntansi adalah suatu proses yang menekankan pada pembuatan, penyajian dan perbaikan informasi kepada pihak pengambilan keputusan yang berwenang dalam menjalankan bisnis (Mulyadi, 2018). Selain itu, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu sistem yang mengolah, menyimpan, mengumpulkan, dan mencatat data berupa informasi bagi pihak pengambil keputusan (Romney & Steinbart, 2018).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem informasi Akuntansi (SIA) adalah sistem yang terintegrasi satu sama lain dalam hal mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data dari berbagai proses transaksi, untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

A. Komponen Sistem

Dijelaskan bahwa komponen dari sistem ini meliputi enam komponen, yaitu :

- a. Orang yang memakai sistem.
- b. Instruksi dan Prosedur yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan mengumpulkan data.
- c. Data tentang organisasi dan kegiatan organisasinya.

- d. *Software* atau perangkat lunak yang digunakan sebagai alat pengolah data.
- e. Infrastruktur yang menunjang teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam SIA.
- f. Dan pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang digunakan untuk melindungi data SIA.

B. Fungsi

Enam komponen diatas digunakan untuk memenuhi tiga fungsi penting bisnis. Ketiga fungsi penting tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Menyimpan dan mengumpulkan data mengenai sumberdaya, personel, dan aktivitas organisasi.
- b. Mengolah data menjadi informasi yang nanti dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi sumberdaya, personel, dan aktivitas organisasi.
- c. Memberikan pengendalian yang cukup untuk menjaga data dan aset organisasi.

2.1.2 Siklus Pendapatan

Siklus pendapatan menurut merupakan serangkaian kegiatan bisnis dan pemrosesan informasi secara ulang-berulang yang berhubungan dengan penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan dan menerima pembayaran sebagai bentuk transaksi terhadap barang atau jasa tersebut (Mardi, 2014) .

Dalam penjelasan lain, siklus pendapatan merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut (Romney & Steinbart, 2018).

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Siklus Pendapatan merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan terus-menerus secara berulang berkaitan dengan penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan dan menerima pembayaran dari pelanggan berkaitan dengan penyerahan barang atau jasa tersebut.

Tujuan utama dari siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Dalam siklus pendapatan, terdapat empat aktivitas dasar pada siklus tersebut (Romney & Steinbart, 2018), yaitu :

1. Entri pesanan penjualan

Dokumen yang dibuat untuk entri pesanan penjualan yang mencantumkan nomor item, kuantitas, harga, dan ketentuan penjualan.

Aktivitas yang dilakukan dalam order penjualan:

- a. Menerima order pelanggan
- b. Memeriksa status/catatan kredit pelanggan
- c. Memeriksa ketersediaan barang
- d. Merespon pertanyaan (*inquiry*) pelanggan

2. Pengiriman

Proses pengiriman barang kepada pelanggan secara umum terdiri atas dua tahap, yaitu:

- a. Menyiapkan (*picking*) dan pengemasan barang (*packing*)
- b. Pengiriman barang (*shipping*)

Kedua tugas tersebut termasuk dalam fungsi penyimpanan aset/persediaan dan bertanggungjawab ke Departemen Produksi.

3. Penagihan

proses pengiriman faktur penagihan pembayaran kepada pelanggan atas transaksi penjualan barang/jasa. Dalam sistem informasi, proses *billing* acapkali dilakukan sebelum, setelah, atau bahkan bersamaan (secara paralel) dengan dilakukannya *shipping* (pengiriman barang).

4. Penerimaan kas

Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah pengumpulan kas. Daftar pengiriman uang memberikan nama dan jumlah semua pengiriman uang pelanggan, dan mengirimkannya ke piutang.

2.1.3 Pajak

Dalam UU No. 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut ahli, pajak merupakan iuran yang diwajibkan oleh undang-undang yang diberikan kepada negara, baik itu orang pribadi maupun badan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan kebutuhan negara tanpa mendapat imbal hasil langsung (Mardiasmo, 2018).

Selain itu, pajak juga dapat diartikan sebagai iuran yang wajib dibayarkan kepada negara yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak yang bersifat memaksa, dapat ditentukan langsung, tidak dipungut biaya prestasi, dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum yang dikeluarkan berhubungan dengan kewajiban untuk pengelolaan pemerintahan (Waluyo, 2011).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara yang tidak memberikan imbalan secara langsung dan diatur dalam undang-undang dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2009).

Pajak daerah yang dikelola oleh pemkot kota Yogyakarta adalah sebagai berikut.

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Parkir
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Air Tanah
6. Pajak Reklame
7. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. BPHTB
10. PBB-P2

2.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

A. Tarif

Pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Kota Yogyakarta, 2020), pengenaan tarif adalah sebagai berikut.

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan nilai \leq Rp.2.000.000.000 dikenakan tarif 0,05%
2. NJOP dengan nilai $>$ Rp.2.000.000.000 sampai Rp.2.000.000.000 Rp.5.000.000.000 dikenakan tarif 0,07%

3. NJOP dengan nilai > Rp.5.000.000.000 sampai Rp.10.000.000.000 dikenakan tarif 0,12%
4. NJOP dengan nilai > Rp.10.000.000.000 sampai Rp.50.000.000.000 dikenakan tarif 0,25%
5. NJOP dengan nilai > Rp.2.000.000.000 dikenakan tarif 0,30%

B. Pengurangan ketetapan PBB-P2

Dalam Perwal Pasal 15 menjelaskan bahwa Pengurangan ketetapan PBB-P2 dapat berupa:

1) pengurangan ketetapan pajak secara langsung

Pengurangan ketetapan pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:

- a. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat; dan/atau
- b. objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat.

2) pengurangan ketetapan pajak secara tidak langsung.

Pengurangan ketetapan pajak secara tidak langsung diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:

- a. Adanya kondisi tertentu terhadap objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;

- b. karena Wajib Pajak tidak mampu secara keuangan (masyarakat berpenghasilan rendah) dibuktikan dengan Kartu Menuju Sehat (KMS) atau kartu sejenis dan/atau surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah setempat;
- c. dalam hal objek pajak-nya telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai bangunan cagar budaya dan bangunan warisan budaya dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial; dan/atau
- d. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Besarnya pengurangan pajak secara tidak langsung yang diberikan:

- a. paling tinggi 75% dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c.
- b. paling tinggi 100% dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek

2.2 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut

Menurut Putri, (2023) meneliti mengenai Pengaruh pembayaran sistem online terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa pembayaran melalui sistem *online* memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di BAPEPENDA UPT Tengah Kota Bandung.

Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Wijayanti et al., (2021) meneliti tentang Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (E-PBB P2). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada pendapatan walau tidak signifikan. Namun ditemukan bahwa penerimaan pendapatan yang lebih cepat ke Pemerintahan Daerah.

Pada tahun sebelumnya Lutfiana et al., (2020) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di Lazis Jateng Cabang Solo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Akuntansi berupa penggunaan aplikasi SiLazisku pada Lazis Jateng cabang Solo memberikan dampak berupa peningkatan efisiensi dalam bekerja.

Masih pada tahun yang sama, Tambunan, (2020) juga meneliti tentang Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Secara Efektif Dan Efisien Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan yang diterapkan dan diimplementasikan pada RSUD Tarutung sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian, Purba, (2018) melaksanakan penelitian dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan: Studi Kasus Pada Sebuah Rumah Sakit. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan yang diterapkan sudah berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, dokumen, fungsi, jaringan prosedur dan pencatatan akuntansi sudah sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit .

Tabel 2. 1 Kajian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Temuan
1.	Putri (2023)	Pengaruh pembayaran sistem online terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran melalui sistem online memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di BAPEPENDA UPT Tengah Kota Bandung
2.	Wijayanti et al., (2021)	Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (E-PBB P2)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada pendapatan walau tidak signifikan. namun ditemukan bahwa penerimaan pendapatan yang lebih cepat ke Pemerintahan Daerah
3.	Lutfiana et al., (2020)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di Lazis Jateng Cabang Solo	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Akuntansi berupa penggunaan Silazisku di Lazis Jateng cabang Solo memberikan dampak

No	Peneliti	Judul	Temuan
			berupa peningkatan efisiensi dalam bekerja.
4.	Tambunan (2020)	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Secara Efektif Dan Efisien Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	Hasil penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi di RSUD Tarutung sudah berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
5.	Purba (2018)	Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan: Studi Kasus Pada Sebuah Rumah Sakit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan yang diterapkan dan diimplementasikan pada rumah sakit yang menjadi objek penelitian sudah berjalan dengan efektif dan efisien. selain itu dokumen, jaringan prosedur dan catatan akuntansi

No	Peneliti	Judul	Temuan
			yang dibutuhkan sudah sesuai dengan kebutuhan Rumah sakit.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan juga perbedaan dalam setiap penelitian. Perbedaan terdapat pada waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, maupun proses bisnis yang dilakukan. Sedangkan persamaan dalam penelitian diatas adalah efisiensi dalam penggunaan Sistem Informasi Akuntansi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian adalah proses analisis yang tidak menggunakan angka atau parameter statistik untuk menjawab suatu penelitian. Selain itu, metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah mendeskripsikan secara jelas dan rinci dari data yang didapat (Alviolita & Yunus, 2021).

3.2 Sumber dan Data Penelitian

Sumber dan data penelitian dari penelitian ini diperoleh dari instansi BPKAD kota Yogyakarta. Dari instansi BPKAD kota Yogyakarta diperoleh data berupa data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari BPKAD kota Yogyakarta sebagai pihak yang dianggap memiliki sumber data lebih akurat keberadaannya.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapat baik secara langsung maupun tidak langsung dari BPKAD kota Yogyakarta, dapat berupa kajian terdahulu yang dapat membantu dalam penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan proses penelitian yang kompleks dengan melibatkan proses biologis dan psikologis. Penelitian ini sangat mengandalkan ingatan dan pengamatan dari peneliti (Hardani et al., 2020).

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi tertentu. Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan maksud tertentu (Hardani et al., 2020). Disisi lain, wawancara merupakan kegiatan guna memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian dengan bertatap muka antara penanya dengan responden dengan panduan wawancara (Nazir, 2009).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan kegiatan memperoleh data dalam bentuk tertulis baik itu dalam bentuk arsip, buku, dokumen, gambar, dan angka yang memberikan dukungan terhadap penelitian (Sugiyono, 2018). Selain itu, Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan mengumpulkan data-data yang sudah ada (Hardani et al., 2020).

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengolah data yang ada menjadi informasi yang bermanfaat bagi peneliti. Teknik analisis yang digunakan merupakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan sistematisa penggunaan sistem informasi akuntansi, bagaimana efisiensi penggunaan sistem informasi akuntansi, hambatan yang dilalui dalam penggunaan sistem informasi akuntansi dan upaya dalam mengatasi kendala dalam penggunaan sistem informasi akuntansi . Analisis didahului dengan pengumpulan informasi oleh peneliti selama melaksanakan magang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Yogyakarta dengan mengandalkan indra dari peneliti, baik itu didengar maupun dilihat peneliti. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang relevan. Dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang logis disertai dengan saran atau masukan mengenai penggunaan sistem informasi akuntansi di instansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Yogyakarta.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Instansi



Gambar 4. 1 Logo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Nama instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Yogyakarta

Alamat : Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55165

Website : bpkad.jogjakota.go.id

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, dibentuklah sebuah Badan Daerah yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pada awalnya BPKAD bernama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang memiliki tugas berupa mengelola keuangan daerah Kota Yogyakarta. Pada 2009 dilakukan penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah yang menyebabkan BPKD bergabung dengan kantor yang memiliki tugas berupa mengelola pendapatan pajak daerah yaitu KPPD (Kantor Pelayanan Pajak Daerah). Penggabungan dua instansi kemudian diberi nama menjadi Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sekaligus dengan pengelolaan pendapatan daerah. Pada 2017 dilakukan kembali penataan lembaga instansi pemerintah daerah yang melibatkan DPDPK Kota Yogyakarta dengan Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta. DBGAD Kota Yogyakarta dipecah menjadi tiga bagian. Dua bagian yang berhubungan dengan Gedung dan Bangunan digabung ke dalam Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (*DPUPKP*) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kota Yogyakarta. Sedangkan satu bagian lainnya melebur ke dalam DPDPK dan berubah menjadi Bidang Aset. Dengan peleburan tersebut, DPDPK akhirnya berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Susunan organisasi BPKAD Kota Yogyakarta terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Pembukuan Penagihan dan Keberatan Pengembangan Pendapatan Daerah,

3. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang representatif sesuai standar, tertib, optimal dan akuntabel.

Fungsi BPKAD diatur Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Fungsi BPKAD Kota Yogyakarta meliputi:

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan keuangan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan anggaran daerah;
5. pengoordinasian penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah;
6. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan aset daerah;
7. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah;
8. pengoordinasian penyelenggaraan pembukuan, penagihan dan pengembangan pendapatan daerah;
9. pengoordinasian penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah;
10. pengoordinasian pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. pengoordinasian penetapan dan pengelolaan jaminan bongkar reklame;
12. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;

13. pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi Badan;
14. pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
15. pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
16. pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
17. pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
18. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan.

4.2 Pelaksanaan Program Magang

Data peserta yang akan mengikuti magang adalah sebagai berikut :

Nama	: Javier Erlandaffa Satria Dwikamba
NIM	: 19312482
Program Studi	: S1 Akuntansi
Fakultas	: Bisnis dan Ekonomika
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia

Semester : VIII (delapan)

Durasi Magang : 1 Maret 2023 - 31 Juni 2023

Bagian : Penagihan

Tabel 4. 1 Pelaksanaan Magang

No	Tanggal	Aktivitas
1.	27 Februari 2023	Pembekalan Peserta Magang.
2.	1 - 10 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">● Ikut melaksanakan kegiatan Pekan PBB di lapangan.● Ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi PBB.● Input data permintaan keringanan atau bebas denda dari wajib pajak.● Rekapitulasi wajib pajak yang hadir di kegiatan Pekan PBB.
3.	13 - 17 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">● Melaksanakan kegiatan Pekan PBB di lapangan.● Input data permintaan keringanan atau bebas denda dari wajib pajak.● Melaksanakan kegiatan penagihan ke lapangan.
4.	20 - 31 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">● Peserta magang memahami mengenai SOP dari keringanan pajak pajak daerah.● Mempelajari tentang penggunaan <i>payment online system</i> yang digunakan oleh sub bidang penagihan.
5.	3 - 7 April 2023	<ul style="list-style-type: none">● Input data permintaan keringanan atau bebas denda dari wajib pajak.● Mendistribusikan surat jawaban walikota ke pelayanan, pembukuan, dan penetapan.

No	Tanggal	Aktivitas
		<ul style="list-style-type: none"> • Input scan surat jawaban walikota.
6.	10 - 18 April 2023	Mempersiapkan Undangan untuk wajib pajak yang akan diundang untuk mengikuti pelaksanaan Pekan PBB setelah puasa.
7.	19 - 26 April 2023	Cuti Bersama Hari raya Idul Fitri.
8.	27 April - 5 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan Undangan untuk wajib pajak yang akan diundang untuk mengikuti pelaksanaan Pekan PBB setelah puasa. • Input data permintaan keringanan atau bebas denda dari wajib pajak
9.	8 - 12 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan persiapan untuk kegiatan Pekan Panutan pada tanggal 25 Mei • Mempersiapkan Undangan untuk wajib pajak yang akan diundang untuk mengikuti pelaksanaan Pekan PBB setelah puasa
10.	15 - 19 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Rekapitulasi Permohonan Keringanan PBB P2 Tahun 2023 • Melakukan persiapan undangan untuk tamu yang akan diundang pada Pekan Panutan • Melakukan take video mengenai kegiatan sehari-hari selama magang di BPKAD kota yogyakarta yang merupakan salah satu tugas dalam rangkaian tugas akhir
11.	22 - 26 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti kegiatan Pekan Panutan yang menjadi acara tahunan terbesar yang dilaksanakan oleh sub bidang penagihan • Mempersiapkan undangan untuk kegiatan

No	Tanggal	Aktivitas
		Pekan PBB <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa melanjutkan take video sebagai salah satu tugas dalam rangkaian tugas akhir.
12.	29 Mei 2023 – 31 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan undangan untuk kegiatan Pekan PBB • Melakukan Input Surat Keputusan walikota

Selama kegiatan magang, Peserta magang mendapatkan data mengenai aktivitas sehari-hari yang selama menjalankan kegiatan di sub bidang penagihan. Berikut merupakan output yang diperoleh oleh peserta magang selama proses magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta :

1. Peserta magang mengenali budaya instansi secara umum yang dilakukan
2. Peserta magang mempelajari bagaimana berinteraksi dengan wajib pajak
3. Peserta magang memahami mengenai kegiatan input data ke kendali
4. Peserta magang mendapat pemahaman mengenai kegiatan Pekan PBB sebagai bentuk penagihan langsung ke lingkungan masyarakat
5. Peserta magang memahami *Payment Online System* yang digunakan oleh BPKAD kota yogyakarta
6. Peserta magang mendapat pengalaman untuk melakukan rekapitulasi Permohonan Keringanan PBB P2 Tahun 2023
7. Peserta magang memahami alur berkas dari wajib pajak yang terjadi di sub bidang penagihan.

4.3 Hasil Analisis

4.3.1 Penggunaan POS (Payment Online System).

Aplikasi *Payment Online System* Pajak Bumi bangunan atau POS PBB merupakan salah satu aplikasi atau sistem berbasis web yang digunakan oleh instansi BPKAD kota yogyakarta sebagai sarana untuk membantu proses terkait PBB di kota yogyakarta. Aplikasi sendiri merupakan sebuah perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu dan berfungsi untuk membantu kegiatan yang dilakukan oleh manusia (Huda & Priyatna, 2019). Dalam penggunaannya, Aplikasi POS PBB pada BPKAD kota yogyakarta memiliki kegunaan sebagai berikut.

1. POS PBB digunakan sebagai alat input keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan oleh wajib pajak atau WP,
2. POS PBB digunakan sebagai sarana bagi penelaah untuk melihat rekam jejak dari berkas permohonan keringanan,
3. POS PBB digunakan sebagai alat bantu penelaah dalam mencetak surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT dan surat lainnya.

SOP Pemberian keringanan terhadap Wajib pajak:

- a. Pada tahap pertama, Wajib pajak memasukan berkas permohonan keringanan melalui loket pelayanan PBB yang dibawah sub bidang pelayanan, berada di Mal Pelayanan Publik, Balai kota Yogyakarta.

Pada tahap ini, petugas loket melaksanakan pemeriksaan berkas sesuai dengan permohonan keringanan yang diajukan oleh

wajib pajak . Berkas yang sudah lengkap kemudian dilanjutkan dengan input data kedalam sistem dan dilakukan rekapitulasi per harinya oleh petugas loket. Berdasarkan Peraturan Walikota (PERWAL) Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Kota Yogyakarta, 2019), Secara umum berkas yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :

- 1) Surat permohonan Pengurangan pajak PBB - P2, satu permohonan untuk satu SPPT, surat wajib berbahasa Indonesia dan diajukan kepada walikota dengan disertai persenan pengurangan dan alasan yang jelas.
- 2) Surat Pernyataan Tidak Mampu membayar PBB P2/ KTP / Kartu Keluarga Wajib Pajak / Sertifikat / Surat kuasa dan Fotokopi KTP penerima kuasa bermaterai apabila permohonan dikuasakan,
- 3) Lampiran fotokopi SPPT Tahun yang berjalan,
- 4) Lunas PBB Tahun sebelumnya disertai bukti pembayaran atau print out BPKAD,

Sedangkan dokumen khusus yang wajib diajukan oleh wajib pajak dibagi menjadi beberapa kriteria, yaitu:

- 1) Umum

Wajib pajak memiliki surat pernyataan tidak mampu yang diketahui, ditandatangani dan dicap basah oleh lurah, RT, maupun RW.

2) Pensiunan maupun janda PNS maupun BUMN

Wajib pajak yang memiliki kriteria pensiunan wajib melampirkan Surat Keputusan (SK) Pensiun yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

3) Veteran dan Janda Veteran

Wajib pajak dengan kriteria veteran atau janda veteran, wajib melampirkan Surat Keputusan (SK) Veteran yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

4) Bangunan Cagar Budaya

Selama cagar budaya tidak digunakan sebagai kegiatan komersial, Wajib pajak yang memiliki objek pajak berupa cagar budaya dapat melampirkan Surat Keputusan (SK) Cagar Budaya untuk mengajukan keringanan.

5) KMS (Kartu Menuju Sejahtera)

Wajib pajak Memiliki KMS yang dibagikan oleh pemerintah kota Yogyakarta.

6) Badan Usaha

Untuk badan usaha, Wajib pajak diminta untuk melampirkan laporan keuangan sederhana tahun sebelumnya dan akta pendirian sebagai bahan pertimbangan.

b. Pada tahap kedua, Berkas akan diberikan kepada kepala sub bidang (kasubid) penagihan.

Kepala sub bidang (kasubid) penagihan memberikan persentase berdasarkan berkas yang diberikan beserta dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan aturan yang ada berdasarkan kriteria dari wajib pajak permohonan tersebut. Wajib pajak mendapat persentase keringanan sesuai dengan hak yang dapat diperoleh oleh wajib pajak.

c. Pada tahap ketiga, Berkas dibagikan kepada penelaah atau analis penagihan.

Berkas dibagikan kepada penelaah yang bertanggung jawab atas wilayah objek pajak tersebut, setiap penelaah dapat memegang satu atau lebih berkas pengajuan keringanan. Berkas kemudian akan diinput kedalam sistem POS PBB bersamaan dengan persentase yang diberikan.

Untuk melakukan input data kedalam POS PBB, penelaah diharuskan masuk menggunakan akun khusus untuk melakukan input data berkas pengajuan keringanan. Setelah masuk, penelaah kemudian memilih menu pengurangan dan melakukan pencarian nomor pelayanan. Setelah penelaah menemukan nomor pelayanan, penelaah dapat melakukan input data disertai dengan pengecekan ulang berkas dan persentase yang sudah ditetapkan oleh kasubbid penagihan. Data yang sudah diinput kemudian dilakukan proses hitung dan menghasilkan dokumen berupa draft berita acara,

rancangan surat pengantar kepala BPKAD kepada walikota dan rancangan surat keputusan walikota.

Dokumen-dokumen tersebut nantinya dicetak oleh penelaah dan dimasukkan kedalam berkas wajib pajak agar dapat melanjutkan tahap berikutnya.

d. Pada tahap keempat, verifikasi berkas oleh atasan.

berkas permohonan yang sudah dilengkapi lampiran dokumen pada tahap sebelumnya, kemudian diberikan kepada kasubid (kepala sub bidang) penagihan untuk dilakukan pengecekan pada berkas keringanan. berkas keringanan yang sudah dilakukan pengecekan oleh kasubid kemudian diparaf dan dilanjutkan pemberian berkas kepada kabid (kepala bidang) P4,

Berkas yang diterima oleh kabid kemudian dilakukan pengecekan kembali untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan pada berkas keringanan yang diajukan. Berkas yang sudah dilakukan pengecekan kemudian diberi paraf dan diserahkan kepada kaban (kepala badan).

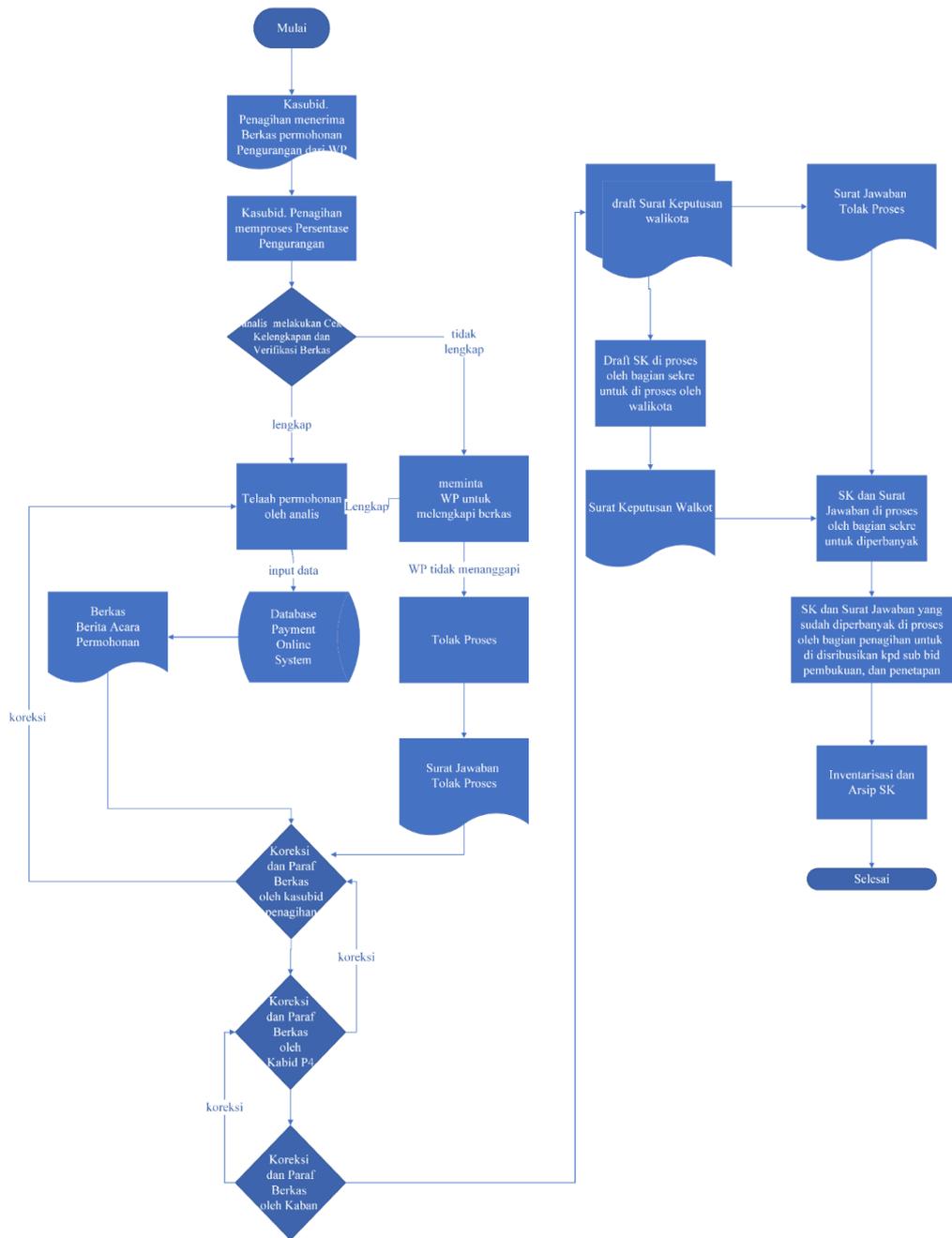
Berkas yang diterima kaban kemudian dilakukan pengecekan kembali untuk memastikan bahwa berkas yang diajukan sudah sesuai dan tidak ada kesalahan pada berkas. Berkas yang sudah sesuai kemudian diberi paraf untuk membuktikan bahwa berkas pengajuan keringanan sudah sesuai. berkas pengajuan keringanan yang sudah sesuai dan diparaf kemudian

diberikan kepada bagian sekre BPKAD untuk melanjutkan proses selanjutnya.

e. **Pada tahap kelima, berkas diberikan kebagian sekre BPKAD.**

berkas yang sudah diparaf kemudian diberikan kepada bagian sekre untuk diserahkan kepada walikota agar draft Surat Keputusan (SK) walikota pada berkas tersebut dapat ditandatangani. Berkas pengajuan keringanan yang sudah ditandatangani oleh walikota kemudian diserahkan kembali kepada bagian sekre BPKAD.

Setelah menerima kembali berkas pengajuan keringanan, bagian sekre bertugas untuk mengirimkan SK asli kepada wajib pajak selaku pemohon dan memperbanyak salinan SK yang sudah selesai proses pengajuan keringanan yang kemudian akan diberikan kepada sub bidang penagihan sebagai bahan rekapitulasi dan arsip.



Gambar 4. 3 Flowchart alur Pemberian keringanan kepada wajib pajak

4.3.2 Efisiensi penggunaan POS PBB.

Sistem informasi akuntansi berupa penggunaan Aplikasi *Payment Online System* (POS) PBB merupakan sebuah sistem yang menunjang kegiatan pemberian keringanan pada instansi BPKAD kota Yogyakarta untuk membantu mengurangi kesalahan pada pencatatan yang sering terjadi disebabkan oleh *human error* dalam proses pemberian keringanan terhadap wajib pajak sekaligus sebagai sarana penyimpanan data yang diajukan oleh wajib pajak di kota yogyakarta. efisiensi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu kegiatan secara tepat dengan memaksimalkan penggunaan waktu, biaya dan tenaga. (Dindayani et al., 2019)

Dalam penerapannya, penggunaan POS PBB sangat membantu dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya berupa tenaga, biaya dan waktu. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan pegawai BPKAD kota yogyakarta. *“Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya sudah efisien baik itu secara waktu, tenaga dan biaya. Ketika adanya sistem, waktu untuk memproses telaah berkas menjadi lebih cepat daripada sebelum adanya sistem payment online system . Secara biaya, karena sudah berkurangnya error yang terjadi dapat mengurangi biaya untuk mencetak ulang dari dokumen atau berkas yang salah cetak.”* - Pak Maimun, *analisis penagihan pajak (2023)*

Selain itu, dengan adanya aplikasi POS PBB, pegawai BPKAD dapat melakukan proses keringanan yang diajukan oleh wajib pajak dengan waktu yang lebih singkat sehingga pegawai instansi BPKAD dapat

memanfaatkan waktu yang ada dengan melakukan pekerjaan lain sesuai dengan tupoksi yang ada.

“ya dengan menggunakan SIA pemberian keringanan sangat efisien, baik untuk proses telaah, proses penerbitan Surat jawabannya, dan jumlah penelaah yang mengampu. Secara SDM, pos pbb sudah cukup efisien karena setiap satu orang dapat mengampu lebih dari satu wilayah yang dapat ditelaah selain itu, waktu yang digunakan lebih cepat sehingga dapat mengerjakan pekerjaan lain selain kegiatan pemberian telaah berkas”. Elsi, analisis penagihan pajak (2023)

Kehadiran POS PBB yang sangat membantu, tentunya disertai dengan kesesuaian penerapan sistem POS PBB dengan ketentuan SOP yang ada. Dengan kesesuaian tersebut, data yang dihasilkan merupakan data yang sesuai dan menunjang dalam kegiatan proses keringanan wajib pajak. *“Sudah efisien dan efektif untuk menunjang kegiatan pencatatan dan pemberian keringanan pos pbb karena dengan adanya pos pbb pekerjaan menjadi lebih mudah serta menjadi lebih tertata, aplikasi pos pbb juga sudah memenuhi SOP yang sudah ada. Oleh karenanya semua pekerjaan sudah dilakukan dg baik dan sesuai dengan SOP.” - Salomo, Pengolah data penagihan pajak (2023)*

“Sudah cukup efisien dilihat dari segala informasi yang kami butuhkan sudah cukup untuk bisa mencakup dalam sistem tersebut dan juga dalam penggunaannya juga sudah cukup membantu kami sebagai petugas dan juga dalam hal ketepatan waktu juga sudah cukup efisien.” Adhit, Pengolah data penagihan pajak (2023)

Meskipun begitu, walau penggunaan biaya sudah cukup efisien, penggunaan POS PBB tidak serta merta mengurangi penggunaan kertas di lapangan sehingga secara pemanfaatan waktu dan biaya kurang optimal. *“Secara material masih belum maksimal karena banyak menggunakan kertas. Secara SDM, pos pbb sudah cukup efisien karena setiap satu orang dapat mengampu lebih dari satu wilayah yang dapat ditelaah.”* Zaka Gofar Maulana, *Pengelola penagihan dan pengawasan.*

Pada hasil wawancara ini, didapatkan bahwa penggunaan sistem informasi berupa penggunaan POS PBB sangat membantu pegawai BPKAD kota yogyakarta dalam melakukan kegiatan pemberian keringanan kepada wajib pajak dengan efisien. Didukung dengan proses pemberian keringanan yang lebih cepat dan meminimalisir penggunaan biaya dalam penggunaan kertas meskipun kurang maksimal.

4.3.3 Hambatan

Meski penggunaan aplikasi POS PBB sudah cukup efisien, ditemukan beberapa hambatan yang terjadi selama penggunaan aplikasi POS PBB. Berdasarkan hasil wawancara, hambatan yang dialami diantaranya sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung perpindahan menuju aplikasi POS PBB.
- b. Sumber daya manusia yang kurang memahami cara penggunaan *payment online system*.

- c. Kemampuan penguasaan terhadap SIA masing-masing penelaah berbeda sehingga saat pertama sistem ini digunakan masih terdapat ketidakseragaman dalam proses pemberian keringanan PBB-P2, yaitu beberapa penelaah sudah dapat mengaplikasikan penggunaan sistem tersebut dan beberapa penelaah masih melakukan secara manual.
- d. Tingkat ketelitian masing-masing penelaah berbeda, sehingga walaupun telah diberikan menu menu yang simple , masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam proses proses pemberian keringanan PBB-P2. contohnya adalah pemberian keringanan dikabulkan atau ditolak, penelaah bisa memilih pilihan tersebut, namun masih ada beberapa yang salah dalam memilih opsi tersebut, misal diberikan 0% namun dipilih dikabulkan yang seharusnya ditolak.
- e. Belum sempurnanya SIA saat pertama kali diluncurkan, sehingga pengguna masih kesulitan dalam menyajikan beberapa laporan yang dibutuhkan seperti berapa permohonan yang dikabulkan dan ditolak
- f. Belum terhubungnya SIA khusus pemberian keringanan dengan SIA untuk penerimaan berkas yang ada di loket pelayanan, sehingga terjadi double pekerjaan yang dilakukan oleh petugas loket dan penelaah keringanan.

- g. Aplikasi POS PBB hanya dapat menggunakan jaringan internal, sehingga tidak dapat digunakan diluar area BPKAD.
- h. Apabila aplikasi POS PBB mengalami *error* pada jaringan internal, Aplikasi POS PBB tidak bisa digunakan sama sekali.
- i. Terjadi *error* pada nomor layanan sehingga nomor layanan tidak ditemukan,
- j. Terjadi perhitungan keringanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan.
- k. Terjadi *error* pada sistem saat mengentri nomor pelayanan sebagai akses untuk bisa memproses keringanan, sehingga aplikasi POS PBB tidak bisa dibuka saat melakukan input nomor pelayanan.
- l. Adanya wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajak PBB tahun sebelumnya, sehingga berkas yang diajukan tidak dapat diproses.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor hambatan yang terjadi selama penggunaan POS PBB banyak disebabkan oleh faktor sistem yang mengalami error pada saat sinkronisasi nomor pelayanan, sehingga menyebabkan penggunaan sumber daya yang berlebih saat akan melakukan proses pemberian keringanan. Meskipun begitu, faktor dari kesalahan manusia juga terjadi dikarenakan kurang telitinya penelaah ketika melakukan kegiatan pemberian keringanan.

4.3.4 Upaya

Untuk mengatasi hambatan tersebut, instansi BPKAD tentunya melakukan berbagai upaya agar hambatan yang terjadi dapat berkurang, diantara usaha yang dilakukan oleh BPKAD adalah sebagai berikut :

- a. Diadakan pengadaan perangkat keras dan lunak.
- b. Dilakukan pelatihan penggunaan SIA secara intensif.
- c. Dilakukan pengendalian atau koreksi di tingkat kasubbid.
- d. Dilakukan Penyempurnaan menu-menu tambahan yang dibutuhkan dilakukan secara bertahap.
- e. Dibangun aplikasi E-PBB keringanan yang menyatukan SIA penerimaan berkas dengan pemberian keringanan.
- f. Untuk jaringan dikelola oleh kominfo, apabila terjadi error akan diatasi oleh kominfo.
- g. Dalam Sinkronisasi data, jika ditemukan kembali kasus ketidaksamaan data sudah ada menu sinkronisasi nomor pelayanan sehingga dapat disinkronisasikan oleh penelaah.
- h. Bekerja sama dengan loket pelayanan untuk menyelesaikan masalah nomer pelayanan, bila tidak bisa diselesaikan maka akan diberikan nomor pelayanan baru dan menghapus nomor pelayanan yang bermasalah.
- i. Analisis penagihan melakukan penggantian persenan yang salah dengan menggunakan menu edit agar pemberian keringanan dapat disesuaikan dengan keputusan yang diberikan.

- j. Berkonsultasi dengan vendor aplikasi dalam mencari jalan keluar atas kendala yang terjadi.
- k. Menghubungi bagian IT agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Berdasarkan poin-poin diatas, dapat dianalisis bahwa BPKAD kota Yogyakarta sudah melakukan berbagai upaya seperti pengadaan sumberdaya pendukung berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, pelatihan SDM, hingga bekerjasama dengan internal dan eksternal BPKAD kota yogyakarta untuk mengatasi permasalahan pada POS PBB. Upaya-upaya ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dari penggunaan aplikasi POS PBB pada BPKAD kota Yogyakarta dalam melakukan proses keringanan yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Aplikasi *Payment Online System* Pajak Bumi bangunan atau POS PBB merupakan salah satu aplikasi penting yang digunakan oleh instansi BPKAD kota Yogyakarta sebagai sarana untuk membantu proses terkait PBB di kota Yogyakarta. Berdasar pada hasil analisis penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Analisis Sistem Informasi Akuntansi Berupa Penggunaan *Payment Online System* Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Pemberian Keringanan Wajib Pajak Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta berjalan dengan baik dan efisien, serta penyediaan menu yang sesuai dengan kegiatan pemberian keringanan PBB kepada wajib pajak mempermudah penelaah dalam melaksanakan kegiatan telaah berkas keringanan yang ada. Meskipun penggunaan aplikasi POS PBB sudah efisien, kendala penggunaan aplikasi tersebut masih dapat ditemukan baik itu berupa kesalahan sistem maupun kesalahan manusia (*human error*). Untuk meminimalisir kendala tersebut, instansi BPKAD kota Yogyakarta melakukan upaya berupa pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak; pelatihan terhadap satuan kerja; hingga kerjasama dengan bagian internal dan eksternal BPKAD kota Yogyakarta untuk mengatasi kendala dalam penggunaan aplikasi POS PBB.

Berdasarkan analisis penelitian ini, penulis menyarankan kepada instansi BPKAD kota Yogyakarta untuk mengintegrasikan aplikasi POS PBB dengan aplikasi yang lain untuk meminimalisir penggunaan kertas dan mengurangi kemungkinan berkas yang hilang selama proses pemberian keringanan wajib pajak. Penulis juga menyarankan agar dilakukan pengecekan kembali oleh penelaah mengenai pemberian keringanan terhadap

wajib pajak untuk mengurangi penggunaan kertas secara berulang yang disebabkan oleh *Human error*. Penulis juga menyarankan agar aplikasi POS PBB dapat diakses kembali diluar area BPKAD kota yogyakarta sehingga penelaah dapat melakukan proses pemberian keringanan dimana saja dengan memanfaatkan teknologi berupa *VPN (Virtual Private Network)* untuk menjaga keamanan data POS PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviolita, F., & Yunus, M. (2021). Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit dalam Pengendalian Intern (Surabaya Suites Hotel di Plaza Boulevard, Surabaya). *UBHARA Accounting Journal*, 1(1), 28–38.
- Anggraini, L. (2020). Analisis Payment Online System Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Laporan Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau).
- Dindayani, N. (2020). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Dalam Menunjang Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Pengendalian Intern Pada Pt Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall Ratu Indah. *Economics Bosowa*, 5(003), 172-185.
- Hardani, H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. *Yogyakarta: Pustaka Ilmu*.
- Huda, B., & Priyatna, B. (2019). Penggunaan Aplikasi Content Management System (CMS) Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis E-commerce. *Systematics*, 1(2), 81-88.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Kota Yogyakarta. (2019). Peraturan Walikota (PERWAL) Yogyakarta nomor 96 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
- Kota Yogyakarta. (2020). Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
- Lutfiana, L., Putri, I. M., & Fajriyah, A. N. (2020). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di Lazis Jateng Cabang Solo. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3(1), 25–33.
- Mardi. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2018). *Sistem Akuntansi (4th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, Moh. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purba, D. H. P. (2018). Sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan: Studi kasus pada sebuah rumah sakit. *Jurnal Manajemen*, 4(1), 15–22.

- Putri, A. N. I. A. (2023). Pengaruh pembayaran sistem online terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(7), 3123–3132.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems (Fourteenth Edition)* (14th ed.). Pearson Education Limited.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- TAMBUNAN, L. T. (2020). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Secara Efektif Dan Efisien Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5(4), 90–98.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijayanti, P. F., Nuraina, E., & Astuti, E. (2021). Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (E-PBB P2). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(2), 233–240.

LAMPIRAN



JAVIER ERLANDAFFA SATRIA DWIKAMBA

081334812864 | erlandaffa12@gmail.com | linkedin.com/in/erlandaffa

Yogyakarta, Indonesia

Halo! I am Erlan, 4th year student from Indonesian Islamic University. Have an interest in accounting, and the SAP system.

Education Level

Universitas Islam Indonesia - Indonesia
Bachelor Degree in Accountancy, 3.77/3.99

Aug 2019 - Sep 2023 (Expected)

MAN 1 Yogyakarta - Indonesia

Jul 2015 - May 2018

Organisational Experience

SEMATA 2021 - Yogyakarta, Indonesia
Media & IT

Aug 2021 - Sep 2021

- Responsible for all matters related to the design of SEMATA 2021 .
- Responsible for providing the SEMATA 2021 activity platform.
- Coordinate with the event division in determining the start of the event.
- Maintain security from parties who want to disturb the virtual meeting
- Make documentation of SEMATA 2021 during the activity.
- Provide tools and equipment during SEMATA 2021

Skills, Achievements & Other Experience

- **Certification** (2022): SAP Certified Application Associate - Business Process Integration with SAP S/4HANA 1909
- **Achievements** (2022): 1st Runner-up MonsoonSIM "Trading" International Competition
- **Achievements** (2022): 1st place MonsoonSIM "Trading" National Competition
- **Achievements** (2022): 3rd place MonsoonSIM internal competition 2022
- **Achievements** (2022): 1st place 14th ERPSim International Competition
- **Achievements** (2022): 1st place ERPSim International Competition Asia Pacific Japan 2022
- **Achievements** (2021): 1st place Internal Competition ERPSim 2021
- **Achievements** (2021): 3rd place Internal Competition Monsoonsim 2021
- **Webinars Attended** (2021): Webinar Career Opportunities in ERP-SAP
- **Webinars Attended** (2021): Kuliah Praktisi - SAK 930 Integrasi Proses Bisnis SAP
- **Webinars Attended** (2021): ICAEW CFAB BFP Info Session and Career Webinar
- **Achievements** (2021): 1st place MonsoonSIM ERM "UII Accounting Independence League"

Lampiran 1 CV peserta Magang



Lampiran 2 Halaman Depan POS PBB



Lampiran 3 Bagian Pencarian Permohonan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Home Logout contact

POS PBB

Nama :
 Sebagai :
 Username :

Pengurangan
 Pencarian WP

FORM PROSES PENGURANGAN PBB - P2

A. PERMOHONAN

1. NO PELAYANAN :
 2. PEMOHON

2.1 NIK :
 2.2 NAMA :
 2.3 ALAMAT :
 2.4 KETERANGAN :
 2.5 File Keterangan :

3. DATA SUBJEK

3.1 NAMA WP :
 3.2 ALAMAT WP :

4. DATA OBJEK

4.1 NOMP :
 4.2 ALAMAT OP :
 NOMP BUKTI (Rp.) :
 NOMPWP (Rp.) :
 NOMP u/s Penghitungan PBB :
 PBB terutang (Rp.) :

B. PENGURANGAN

1. DS AJUKAN (%) :
 2. ALASAN :

Hitung

Copyright © 2009 Pemerintah Kota Yogyakarta.

Lampiran 4 Bagian Form Proses Pengurangan